

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Komisiner	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
N e r a c a	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan Atas Laporan Keuangan	4 - 13



LMKN

**SURAT PERNYATAAN KOMISIONER
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: James F. Sundah
Alamat Kantor	: Gedung Eks Sentra Mulia, Lt.6 Komplek Kementerian Hukum dan HAM RI Jl. HR. Rasuna Said Kav X-6/8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain	: Jl. Ganggeng III No. 26 RT004 RW001, Sungai Bambu, Tanjung Priok Jakarta Utara
Nomor telepon	: (021) - 29101017
Jabatan	: Ketua P.T Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Periode 2018

Menyatakan bahwa;

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyalian laporan keuangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional;
2. Laporan keuangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional telah disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang berlaku di Indonesia.
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar,
 - b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material,
3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Jakarta, 09 April 2021

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional


LMKN
James F. Sundah

Ketua PLT Periode 2018



LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

Gedung Kementerian Hukum dan HAM RI (Ex. Sentra Mulia) Lantai 6
Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-6/8, Kuningan Jakarta Selatan 12940 Indonesia



021-29101017



www.lmkn.id



sekretariat@lmkn.id



Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono

Registered Public Accounting Firm
License No. 1016/KM.1/2016

Laporan Auditor Independen

No : 00076/2.1079/AU.2/10/1060-1/1/4/2021

**Komisiner Pencipta dan Komisiner Hak Terkait
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional**

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Lembaga Manajemen Kolektif Nasional**, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, laporan Aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono

Registered Public Accounting Firm
License No. 1016/304 1/2015

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan tertampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Lembaga Manajemen Kolektif Nasional** tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia.

Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono

Tubagus Manshur, S.E., Ak., M.Si., BKP., CA., CPA
No Reg Akuntan Publik AP. 1060

Jakarta, 09 April 2021

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

NERACA

31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam: Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2 0 1 8</u>	<u>2 0 1 7</u>
A S E T			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	4	14.722.390.459	12.096.652.140
Piutang royalti	5	12.979.264.424	5.579.162.412
Piutang lain-lain		-	1.054.858.980
Pajak dibayar dimuka	10a	389.852.668	1.117.037.069
Jumlah aset lancar		28.091.507.551	19.847.710.601
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - bersih	6	4.271.402	-
Jumlah aset lancar		4.271.402	-
JUMLAH ASET		28.095.778.953	19.847.710.601
LIABILITAS DAN ASET BERSIH			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Kewajiban kepada pemilik hak	7	23.216.228.606	14.212.973.637
Utang lain-lain	8	5.698.294.930	6.174.154.711
Beban akrual	9	462.500.000	521.985.000
Utang pajak	10b	179.997.907	836.165.468
Jumlah liabilitas jangka pendek		29.557.021.443	21.745.298.816
ASET BERSIH			
Tidak terikat temporer		(1.461.242.490)	(1.897.588.214)
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH		28.095.778.953	19.847.710.601

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2 0 1 8	2 0 1 7
PENERIMAAN DAN PENDAPATAN			
Jasa manajemen	11	3.627.407.370	1.672.747.103
Pendapatan jasa giro		333.923.503	163.228.342
Pendapatan lainnya		-	111.490.828
Jumlah pendapatan dan penerimaan		<u>3.961.330.873</u>	<u>1.947.466.273</u>
BEBAN			
Beban operasional	12	3.441.100.175	2.411.716.974
Biaya meterai dan administrasi bank		80.069.474	38.517.756
Beban Lainnya		3.821.500	317.000
Jumlah beban		<u>3.524.985.149</u>	<u>2.450.551.730</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH		<u>436.345.724</u>	<u>(503.085.457)</u>
ASET BERSIH AWAL TAHUN		<u>(1.897.588.214)</u>	<u>(1.394.502.757)</u>
ASET BERSIH AKHIR TAHUN		<u>(1.461.242.490)</u>	<u>(1.897.588.214)</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan royalti	5.230.560.327	1.771.082.762
Pembayaran kepada pemilik hak dan pihak ketiga	(1.852.703.933)	(2.344.275.903)
Pembayaran kepada pengurus dan karyawan	(1.731.313.420)	(25.300.000)
Penerimaan bunga bank dan jasa giro	333.923.503	163.228.342
Pembayaran pajak	70.996.840	(360.601.301)
Penerimaan (pembayaran) lain-lain	578.989.200	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>2.630.462.517</u>	<u>9.204.133.900</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(4.724.198)	-
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(4.724.198)</u>	<u>-</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	<u>-</u>	<u>-</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	2.825.738.319	9.204.133.900
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	<u>12.096.652.140</u>	<u>2.892.518.239</u>
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>14.722.390.459</u>	<u>12.096.652.139</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah sebuah Lembaga Negara Bantu Eksekutif Non APBN yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014, untuk mewakili pemilik lisensi atas hak cipta dan atau produk hak terkait, dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial, kepada pemilik lisensi tersebut. Atas kegiatan tersebut LMKN mendapatkan imbalan berupa jasa manajemen.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang efektif berlaku sejak 18 Oktober 2014, mengatur tentang pemberian lisensi atas Hak Cipta dan atau Produk Hak Terkait kepada pengguna yang bersifat komersial dan pemberian royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi satu ciptaan atau produk hak terkait tersebut.

Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta adalah Lembaga Manajemen Kolektif yang mengelola hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk kepentingan komersial

Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait adalah Lembaga Manajemen Kolektif yang mengelola hak-hak yang dimiliki oleh Produser Fonogram dan Performer untuk kepentingan komersial

Petunjuk teknis pelaksanaan proses pengelolaan royalti oleh LMKN diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI 2.01.03.01-04 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan Dan Pendistribusian Royalti Lagu Dan Musik dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI 2.01.03.01-01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Rumah Bernyanyi.

Anggaran dasar LMKN telah mengalami perubahan-perubahan, terakhir dengan akta No 4 tanggal 5 Maret 2013 dibuat dihadapan Ny. Sastriani Josopradi, SH., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AH-27878.AH 01 02 Tahun 2013 tanggal 24 Mei 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 13 September 2013 Tambahan No 101327/2013.

LMKN berkedudukan di Gedung Kementerian Hukum dan HAM RI, (Eks. Sentra Mulia) lantai 6, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6/8, Jakarta Selatan 12940

b. Susunan Komisiner

2018

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-01.KI.01.08 TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Komisiner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait di Bidang Lagu dan/atau Musik, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menetapkan susunan pelaksana tugas komisiner LMKN untuk tahun 2018 yaitu sebagai berikut.

Ketua	: James F Sundah
Wakil Ketua	: Danan Purnomo SH., Ms.
Sekretaris	: Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., MSI.

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

b. Susunan Komisiner (lanjutan)

2018

Anggota	Dr. Imam Haryanto, Drs. SH., MH. Rapin Muchiandjo, SH., ACCS. Ebiet G. Ace Adi Adrian Raden Muhammad Samsudin Drajat Kusuman Yurod Saleh, SH., MH.
---------	---

2017

Berdasarkan Akta No 03 tanggal 3 Juli 2016, yang dibuat oleh Notaris Sri Rahayu, SH, Notaris di Bekasi, susunan Komisiner LMKN adalah sebagai berikut :

Komisiner LMKN Pencipta :

H. Rhoma Rama
James Freddy Sundah
Adi Adrian
Dr. Imam Haryanto, Drs. SH., MH
Slamet Adnyadie

Komisiner LMKN Ilak Terkalt :

Rd. M. Samsudin Drajat Hardjakusumah
Ebiet G. Ace
Djanuar Ishak
Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M, Ph.D
Hard Santoso

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING

Kebijakan akuntansi dan pelaporan LMKN sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia. Prinsip akuntansi signifikan yang diterapkan secara konsisten di dalam penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut :

a. Pernyataan Kepatuhan

Komisiner bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Dasar pengukuran dalam penyajian laporan keuangan adalah biaya perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan kebijakan akuntansi yang diuraikan dalam akun terkait. Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disajikan dengan menggunakan dasar akuntansi akrual.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Untuk tujuan pelaporan arus kas, deposito berjangka yang jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan tidak dimasukkan sebagai setara kas. Kas terdiri atas kas tunai dan kas di bank.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan adalah Indonesia Rupiah (IDR). Jika tidak dinyatakan lain, semua angka yang disajikan dalam laporan keuangan adalah Rupiah penuh.

c. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan yang tidak dijaminakan serta tidak dibatasi pencairannya.

d. Piutang Royalti

Piutang royalti disajikan sebesar jumlah neto royalti yang ditagihkan kepada pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait.

e. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian jangka panjang biaya dibayar di muka disajikan sebagai aset tidak lancar.

f. Aset Bersih Terikat Temporer

Neraca menyajikan masing-masing kelompok aset bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

f. Aset Bersih Terikat Temporer (lanjutan)

Pembatasan permanen terhadap (1) aset seperti tanah atau karya seni yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual atau (2) aset yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen kelompok kedua tersebut berasal dari hibah atau wakaf dan warisan yang menjadi dana abadi (*endowment*).

Pembatasan temporer terhadap (1) sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu, (2) investasi untuk jangka waktu tertentu, (3) penggunaan selama periode tertentu dimasa depan, atau (4) pemerolehan aset tetap dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih yang penggunaannya dibatasi secara temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan temporer oleh penyumbang dapat berbentuk pembatasan waktu atau pembatasan penggunaan, atau keduanya.

Aset bersih tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dan jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasi, dan tujuan organisasi yang tercantum dalam akta pendirian, dan dari perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditur dan pihak lain yang berhubungan dengan organisasi. Informasi mengenai batasan-batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Kewajiban Kepada Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait

Disajikan sebesar royalti atau distribusi (*distributed royalty*) kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan manajemen diakui sebesar 5% dari nilai tagihan ke pemakai hak, pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu dan tingkat bunga bank yang berlaku sedangkan pendapatan lainnya diakui atas dasar akrual

Beban diakui pada saat terjadinya dan sesuai dengan masa manfaatnya (*accrual basis*). Beban dilangguhan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus. Beban bunga diakui atas dasar proporsi waktu dan tingkat bunga yang berlaku

i. Perpajakan

LMKN mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, LMKN harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. LMKN belum mengakui adanya pajak tangguhan

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

j. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

Sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 "Ketengakerjaan" tanggal 25 Maret 2003, diluar program Pensiun Manfaat Pasti, LMKN berkewajiban memberikan kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang ganti rugi kepada karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

PHK tersebut meliputi berhenti karena memasuki usia pensiun, meninggal dunia dan mengundurkan diri secara terhormat. Besarnya kompensasi PHK ditentukan oleh sebab terjadinya PHK, jumlah masa kerja dan besarnya penghasilan tetap yang diterima karyawan pada bulan terakhir. Pada tahun 2018 dan 2017 LMKN belum membukukan kewajiban imbalan pasca kerja karena belum memiliki karyawan tetap.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK-ETAP mewajibkan LMKN untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi. Hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Estimasi dan asumsi

LMKN mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali LMKN. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan terhadap adanya penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode pelaporan berikutnya, diungkapkan di bawah ini:

Ketidakpastian Kewajiban Perpajakan

Pertimbangan dan asumsi dibutuhkan dalam menentukan penyisihan modal dan beban yang dapat dikurangkan dalam mengestimasi provisi pajak penghasilan LMKN. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan LMKN melibatkan penafsiran terhadap peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang pajaknya tidak pasti dalam kegiatan usaha normal.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") atau Auditor Pemerintah. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi dari posisi pajak LMKN dapat bertanggung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI (Lanjutan)

Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan bergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini bergantung pada estimasi produksi, volume penjualan barang atau jasa, harga komoditas, cadangan biaya operasi, belanja modal dan transaksi manajemen lainnya di masa depan.

4. KAS DAN SETARA KAS

	2018	2017
Kas		
Rupiah	15.407.313	9.029.598
Bank		
Rekening giro - Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14.706.983.148	12.087.622.542
Jumlah kas dan setara kas	14.722.390.459	12.098.652.140

Seluruh saldo bank milik LMKN ditempatkan pada bank BUMN dan tidak dibatasi penggunaannya.

5. PIUTANG ROYALTI

	2018	2017
PT Cakrawala Andalas Televisi	1.462.472.890	-
PT Incomarco Prisma Utama	1.077.003.585	-
PT Duta Visua Nusantara Tivi Tujuh	369.341.625	-
PT Televisi Transformasi Indonesia	345.518.547	-
PT Net Mediatama Televisi	253.715.120	59.940.000
PI Graha Layar Prima	244.555.200	-
PT Imperium Happy Puppy	228.450.200	228.450.200
PT Pulera Mataram Mitra Sejahtera	175.274.790	-
PT Agung Wahana Indonesia	161.838.000	-
CV Limas Hotel	154.768.200	-
PT Mitra Suarasejati	152.097.750	-
PT Lima Pilar Jaya Abadi	127.039.200	-
Ade Widagdo	113.736.150	-
CV Anugerah Karya Berlian	105.440.400	82.683.200
PT Bakli Jaya Perkasa	104.839.800	191.959.200
PT Bercinco Bersamajaya	101.047.500	-
PT Bakli Jaya Perkasa	-	191.959.200
PT Lima Jaya Lestari	-	179.820.000
PT As Industri Rekaman Indonesia	-	175.284.790
PT Cinemaxx Global Pasifik	-	143.858.000
Lain-lain (dibawah Rp100.000.000)	7.804.124.467	4.327.229.822
Jumlah piutang royalti	12.979.284.424	5.579.162.412

Merupakan saldo tagihan kepada pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait.

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

6. ASET TETAP

	2018			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan :				
Peralatan kantor	-	4.724.198	-	4.724.198
Akumulasi Penyusutan :				
Peralatan kantor	-	452.796	-	452.796
Nilai Buku	-			4.271.402

7. KEWAJIBAN KEPADA PEMEGANG DAN PEMILIK HAK

	2018	2017
Royalti	18.382.842.893	6.821.315.772
Sentra Lisensi Musik Indonesia	2.955.679.046	4.776.126.400
Hak Pencipta	1.219.408.566	-
Anugrah Royalti Dangdut Indonesia	561.537.291	1.201.345.043
Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia	86.761.011	952.640.564
PT Royalti Anugrah Indonesia	-	47.529.800
PT Wahana Musik Indonesia	-	399.749.324
Star Music Indonesia	-	14.266.935
Jumlah kewajiban kepada pemegang dan pemilik hak	23.216.228.606	14.212.973.637

8. UTANG LAIN-LAIN

	2018	2017
Hak yang belum di tentukan (<i>Unidentified</i>)	3.656.681.926	3.728.880.590
Hak pencipta	1.328.687.258	1.328.687.258
PT Royalti Anugrah Indonesia	215.251.465	-
PT Wahana Musik Indonesia	150.000.000	-
PT AS Industri Rekaman Indonesia	150.000.000	-
Karyawan	6.737.160	6.737.150
Lain-lain	190.937.121	1.108.849.702
Jumlah utang lain-lain	5.698.284.930	6.174.154.711

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

8. UTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

Utang lain-lain kepada PT Royalti Anugrah Indonesia, PT Wahana Musik Indonesia dan PT AS Industr Rekaman Indonesia, merupakan sisa utang atas pinjaman yang diterima Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pada saat mulai beroperasi yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Lembaga. Pinjaman tersebut diterima tanpa dikenakan bunga dan tanpa jadwal pengembalian yang tetap.

9. BEBAN AKRUAL

	2018	2017
Gaji	430.000.000	422.000.000
Jasa profesional	32.500.000	99.985.000
Jumlah beban akrual	462.500.000	521.985.000

10. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

	2018	2017
Pajak Pertambahan Nilai	389.852.668	1.117.037.069
Jumlah uang muka pajak	389.852.668	1.117.037.069

b. Utang pajak

	2018	2017
Pajak Penghasilan Pasal 21	139.873.750	113.810.715
Pajak Penghasilan Pasal 23	-	71.876.763
Pajak Pertambahan Nilai	-	350.498.000
Pajak Pertambahan Nilai atas Surat Tagihan Pajak	40.124.157	-
	179.997.907	836.185.468

11. PENDAPATAN

	2018	2017
Jasa manajemen royalti:		
Digital	1.068.677.553	-
Hak Terkait	891.735.000	618.772.013
Karaoke	579.301.714	111.264.000
Televisi	466.892.118	119.428.998
Mall	221.802.818	121.641.760
Dipinahkan	3.228.409.001	971.106.771

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
 (Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

11. PENDAPATAN

	2018	2017
Pindahan	3.228.409.001	871.106.771
Executive	194.503.125	-
Hote	138.630.000	24.600.000
Restoran	26.151.000	1.374.000
General	24.087.319	-
Bioskop	12.240.000	7.200.000
Rekreasi	1.831.800	-
Diskotik	1.204.000	1.204.000
Transportasi	337.500	-
Toko	73.625	-
Hak Pencipta	-	628.867.332
Toko buku	-	23.500.000
Hak Gabungan	-	11.920.000
Radio	-	2.400.000
Pameran	-	575.000
Jumlah pendapatan	3.627.407.370	1.672.747.103

Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan proses pengelolaan royalti oleh LMKN yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI 2 OT.03.01-04 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti lagu dan musik dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI 2 OT.03.01-01 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penarikan Penghimpunan Dan Pendistribusian Royalti Lagu Dan Musik, huruf H angka 1, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menerima maksimal 5% dari keseluruhan royalti terhimpun untuk biaya operasional.

12. BIAYA OPERASIONAL

	2018	2017
Gaji dan tunjangan	1.731.313.420	1.684.828.332
Operasional komisioner lama	626.000.000	-
Jasa profesional	560.243.750	91.890.001
Pajak	288.147.687	134.775.700
Transportasi	184.155.900	126.108.690
Rumah tangga kantor	33.894.621	10.053.601
Keperluan kantor dan ATK	14.004.291	1.920.200
Penyusulan	452.796	-
Perbaikan dan pemeliharaan	-	50.300.000
Lisensi	-	285.783.750
Entertain dan jamuan	-	26.055.700
lain-lain	1.687.500	-
Jumlah beban operasional	3.441.700.175	2.411.716.974

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

13. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan per 31 Desember 2017 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan per 31 Desember 2018

	Reklasifikasi	
	Sesudah	Sebelum
Pendapatan jasa manajemen		
Mall	121.841.780	110.351.210
Karaoke PHT	111.284.000	89.782.500
Hotel	24.600.000	23.300.000
Karaoke Executive Pro HT	-	21.481.500
Mall Pencipta	-	11.290.550
Hotel Hak Cipta	-	1.300.000
Restaurant	1.374.000	1.122.000
Pameran PHT	575.000	350.000
Restaurant Pencipta	-	252.000
Pameran Pencipta	-	225.000
Biaya operasional		
Gaji dan tunjangan	1.684.829.332	1.229.428.429
Perjalanan dinas	-	444.855.284
Transportasi	123.108.690	108.591.690
Jasa Profesional	91.890.001	116.690.001
Perbaikan dan pemeliharaan	50.300.000	25.300.000
Pos dan kurir	-	17.517.000
Pengobatan	-	10.547.619

14. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan terdampir adalah tanggung jawab Komisiner LMKN dan telah disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 9 April 2021.

